

TAJUK RENCANA

Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

JELANG libur Natal dan Tahun Baru 2025 dipastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok aman, bahkan hingga Ramadan mendatang. Setidaknya itulah hasil monitoring yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta yang melibatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Yogya dan DIY. Tim ini bukan hanya menasar supermarket, tapi juga pasar tradisional yang tersebar di Yogya (KR 11/12). Sejauh ini tidak ditemukan penimbunan maupun permainan harga.

Kita optimis ketersediaan bahan kebutuhan pokok, seperti tepung, minyak goreng, margarin, gula, semuanya tercukupi. Sejahter paman-tauan selama ini juga tak terjadi gejolak harga, umumnya harga kebutuhan pokok stabil. Kalupun terjadi kenaikan harga, masih sebatas kewajaran. Fenomena ini tentu patut disyukuri. Lantas, bagaimana dengan daya beli masyarakat? Inilah aspek yang tak boleh luput perhatian. Sebab, antara ketersediaan barang, stabilitas harga serta daya beli masyarakat saling berkaitan.

Ketika ketersediaan barang mencukupi dan stabilitas harga terkendali, didukung daya beli masyarakat yang tetap terjaga, tentu semua baik-baik saja. Sebaliknya, bila salah satu faktor, misalnya harga barang melonjak drastis, maka akan mempengaruhi dua faktor lainnya, daya beli bisa menurun, ketersediaan barang pun bisa berkurang atau terbatas. Inilah pentingnya kegiatan monitoring pemerintah daerah, baik melalui OPD maupun TPID, sehingga bisa menjaga agar semua aspek tersebut dapat terjaga dan terkendali.

Hemat kita, monitoring harus dilakukan secara intensif dan periodik, sebab sewaktu-waktu kondisi bisa berubah, baik karena faktor alam maupun ulah manusia. Boleh saja semua prediksi positif, aman dan terkendali, namun situasi di lapangan harus tetap diantisipasi. Misalnya terkait tren kenaikan harga kebu-

tuhan pokok menjelang Natal dan Tahun baru, harus tetap diantisipasi, jangan sampai pemerintah daerah 'gagap' menghadapi situasi demikian. Sepanjang kenaikan tersebut masih dalam batas kewajaran, tak perlu dirisaukan.

Sedangkan terkait daya beli masyarakat, tidak bergantung pada satu faktor. Banyak faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat, tak hanya berkaitan dengan harga barang dan jasa, namun juga tingkat pendapatan individu dan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin besar pula kesempatan mereka untuk membeli barang. Juga terkait dengan tingkat inflasi, karena semakin tinggi tingkat inflasinya, maka akan mengurangi nilai riil uang yang dimiliki masyarakat. Akibatnya, daya beli pun menjadi menurun.

Dalam konteks itulah kita mengharapkan TPID, baik Kota Yogya maupun DIY, terus melakukan monitoring kondisi di lapangan dan menekan tingkat inflasi. Kalau kemudian diperlukan tindakan intervensi dari pemerintah untuk menstabilkan harga, sebaiknya dilakukan secara tepat dan tidak terlambat. Intervensi berupa operasi pasar (OP) misalnya, hanya dilakukan ketika harga barang kebutuhan pokok tidak terkendali, melambung secara tak wajar. Namun, hemat kita, OP adalah langkah terakhir ketika tak tersedia alternatif lain yang lebih rasional.

Kita berharap situasi ekonomi, baik makro maupun mikro, tetap terjaga dan tak ada lonjakan kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Apalagi, saat ini daya beli masyarakat, khususnya di DIY, sedang menghadapi tantangan berat. Stabilitas harga kebutuhan pokok diyakini belum cukup mampu mendorong peningkatan konsumsi. Karena itu, di tahun mendatang kita mengharapkan kenaikan UMP yang signifikan guna mendorong daya beli masyarakat. □ - d

Paradoks Transisi Energi Bersih

PERUBAHAN iklim adalah ancaman terbesar abad ini, mendorong dunia mempercepat transisi energi bersih. Dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, transisi ini diharapkan menjadi solusi krisis iklim. Namun, ironisnya, kebijakan ini sering menciptakan masalah baru, terutama bagi masyarakat adat di kawasan eksplorasi energi terbarukan. Sebagai negara dengan potensi energi panas bumi terbesar kedua di dunia, Indonesia menargetkan kapasitas 23.965 MW dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) guna mendukung ambisi energi terbarukan. Energi geothermal dianggap solusi transisi karena emisinya lebih rendah dibanding bahan bakar fosil. Namun, proyek-proyek ini sering mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Tanah adat diambil alih demi pembangunan, meminggirkan budaya, spiritualitas, dan keberlanjutan masyarakat adat.

Blair et al. (2023) menjelaskan fenomena ini sebagai "ekstraktivisme hijau," yakni eksploitasi sumber daya alam yang dibungkus narasi keberlanjutan. Proyek-proyek geothermal sering menyebabkan deforestasi, pencemaran air, hingga pemindahan paksa. Ironisnya, masyarakat adat, penjaga harmoni alam, menjadi korban dari kebijakan yang diklaim "ramah lingkungan."

Triple Nexus Ideologi

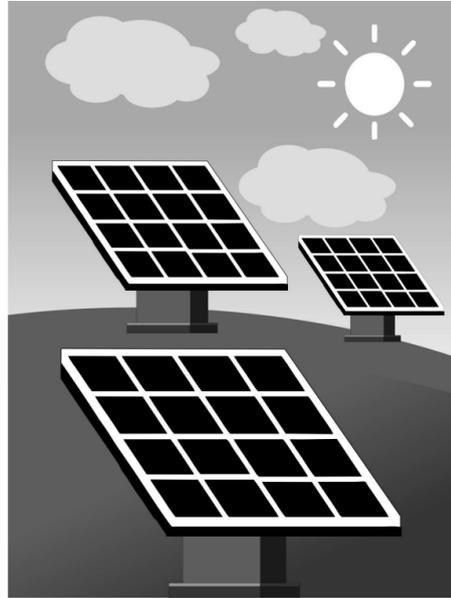
Ironi transisi energi bersih berakar pada fondasi ideologis *Triple Nexus Ideologi*, yakni perpaduan *high-modernity*, *green-developmental*, dan *new-developmental*. Dalam Seeing Like a State (1998), James Scott menggambarkan *high-modernity* sebagai keyakinan pada rasionalitas teknokratis yang mengabaikan dinamika lokal. Ideologi ini didasarkan pada keyakinan kuat bahwa pengetahuan ilmiah dan teknis merupakan cara paling efektif untuk mengatur masyarakat dan menciptakan kemajuan. Para perencana negara, birokrat, dan ahli yang terobsesi dengan prinsip rasionalitas ilmiah sering mengabaikan dinamika sosial dan kultural yang kompleks di masyarakat lokal. Mereka melihat komunitas adat bukan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan lokal yang berharga, melainkan sebagai objek yang harus "diperbaiki" agar sesuai dengan visi pembangunan yang dirancang secara teknokratis.

Ideologi ini kemudian berkembang menjadi *green-developmental*, yang memadukan keberlanjutan lingkungan dengan agenda ekonomi. Meski terdengar mulia, pendekatan ini sering menjadi alat negara untuk memperkuat kontrol atas sumber daya. Proyek geothermal, misalnya, bukan hanya menghasilkan energi

Martin Dennise Silaban

tetapi menopang kawasan wisata prioritas, seperti dalam paradigma *new-developmental* di mana pembangunan infrastruktur besar-besaran dan deregulasi kebijakan sebenarnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial hanya menjadi klaim normatif tanpa implementasi nyata.

Ketika Triple Nexus Ideologi ini bersinergi, ketiganya menciptakan kerangka kebijakan yang menjadikan negara sebagai aktor utama dalam proyek transisi energi. Fokus utamanya bukan pada keadilan



KR-JOKO SANTOSO

sosial atau keberlanjutan ekologi, melainkan pada hasil ekonomi yang dihasilkan dari proyek-proyek tersebut. Dalam praktiknya, paradigma ini tidak hanya mengabaikan masyarakat lokal tetapi juga menghalalkan tindakan koersif untuk mengamankan proyek pembangunan energi bersih. Di berbagai wilayah, proyek geothermal yang menghadapi penolakan dari masyarakat adat sering direspons dengan kriminalisasi, tindakan represif, dan bahkan kekerasan oleh aparat negara. Narasi energi bersih menjadi ironi: solusi global untuk menyelamatkan bumi justru memperburuk kerusakan sosial dan ekologis di tingkat lokal.

Dekonstruksi terhadap Triple Nexus Ideologi ini menjadi langkah penting untuk membuka ruang bagi pendekatan alternatif dalam transisi energi. Sebuah transisi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi dan efisiensi teknis, tetapi juga menghargai keberagaman sosial, budaya, dan ekologi. Dengan mema-

hami ironi ini, kita dapat mendorong dilakukannya dekolonisasi narasi energi bersih di mana masyarakat lokal tidak lagi menjadi objek pembangunan, tetapi subjek yang berdaulat atas sumber daya mereka sendiri.

Dekolonisasi Energi Bersih

Dekolonisasi berarti membebaskan transisi energi dari hegemoni modernitas kolonial. Perspektif ini mengakui bahwa masyarakat adat memiliki cara pandang unik terhadap energi, bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi bagian integral dari ekologi dan spiritualitas. Energi harus dikelola dengan hati-hati, menghormati keseimbangan alam.

Dekolonisasi juga menantang struktur kekuasaan yang memusatkan kendali pada negara dan korporasi besar. Demokratisasi energi adalah kunci, melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat kapasitas mereka mengelola sumber daya. Proyek berbasis komunitas, seperti mikrohidro dan biomassa, bisa menjadi solusi kontekstual jika dirancang dengan partisipasi lokal.

Dekolonisasi transisi energi bukan sekadar soal kebijakan, melainkan perubahan paradigma. Energi bersih harus menjadi langkah nyata menuju keadilan sosial, bukan solusi palsu yang mengorbankan masyarakat rentan. Dengan membongkar narasi hegemonik, kita dapat mendorong transisi yang menghargai keberagaman budaya, sosial, dan ekologi, serta memperjuangkan kesejahteraan bersama.

Hanya dengan cara ini, transisi energi dapat benar-benar adil, manusiawi, dan inklusif, melibatkan masyarakat adat sebagai aktor utama, bukan korban kebijakan. Energi bersih harus menjadi simbol harmoni, bukan instrumen eksploitasi baru. (*)-d

*)**Martin Dennise Silaban**, Peneliti di SHEEP Indonesia Institute / Magister Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, UGM.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Direktur Lithbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00/ baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Eksistensi Transmigrasi ke Depan

Azsep Kurniawan

ADA yang berbeda dalam peringatan Hari Bhakti Transigrasi tahun ini. Bukan soal acaranya, namun pada penyelenggaraannya. Dulu penyelenggaraannya Kementerian Desa PDT Transmigrasi, sekarang penyelenggaraannya Kementerian Transmigrasi. Transmigrasi sudah berdiri sendiri menjadi satu kementerian. Ada harapan transmigrasi semakin mentereng dan tak lekang oleh zaman.

Program transmigrasi sekarang sudah berumur 74 tahun. Sebuah program yang cukup panjang melintasi berbagai era pemerintahan dengan berbagai nomenklatur kementeriannya. Keberangkatan 23 KK (77 jiwa) masyarakat Sukadana, Begelen, Jawa Tengah ke Gedong Tataan, Lampung pada 12 Desember 1950 menjadi peristiwa bersejarah yang kemudian hari diperingati sebagai Hari Bhakti Transmigrasi (HBT).

Data Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (2024) bahwa transmigrasi telah mendorong lahirnya 116 ibu kota kabupaten, 466 ibu kota kecamatan, dan 1.567 desa definitif. Bahkan transmigrasi juga telah mendorong terbentuknya tiga provinsi baru, yaitu Mamuju ibukota Provinsi Sulawesi Barat, Tanjung Selor ibukota Provinsi Kalimantan Utara, dan Merauke ibukota Provinsi Papua Selatan.

Agar transmigrasi ke depan lebih eksis, permasalahan-permasalahan yang ada harus segera ditangani. Setidaknya ada tiga isu utama. Pertama, anggaran. Terjadi penurunan penempatan jumlah transmigran dalam lima tahun terakhir walau animo masyarakat tetap tinggi. Penempatan transmigran pada tahun 2019 sebanyak 1.408 KK, tahun 2020 sebanyak 0 KK (pandemi), tahun 2021 sebanyak 354 KK, tahun 2022 sebanyak 571 KK, tahun 2023 sebanyak 193 KK. Di tahun 2024 animo masyarakat untuk menjadi transmigran cukup tinggi, yaitu sebanyak 7.000 KK, namun yang diberangkatkan 121 KK.

Selain jenis Transmigrasi Umum (TU) yang semuanya dibiayai pemerintah, ada jenis transmigrasi yang bisa *sharing* anggaran. *Sharing* anggaran dengan biaya transmigrasi sendiri, yaitu Transmi-

grasi Swakarsa Mandiri (TSM), namun tetap pembinaannya oleh Pemerintah. Juga ada *sharing* anggaran dengan perusahaan atau swasta, yaitu dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB). Ke depan perlu dicari terobosan-terobosan baru agar diperoleh alternatif sumber penganggaran lain.

Kedua, ketersediaan lahan. Pada umumnya transmigran akan mendapat lahan perkarangan seluas 0,25 ha, lahan usaha I seluas 0,75 ha, dan lahan usaha II seluas 1 ha. Namun kadang ada transmigran belum sepenuhnya memperoleh haknya, ada yang sudah lahan usaha namun belum bisa diolah. Lahan yang belum *clear* dan *clean* bisa menjadi sengketa.

Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pada tahun 2024 bakal mengalokasikan tanah seluas 564.957 hektare untuk program transmigrasi. Tanah tersebut berupa tanah telantar yang tersebar luas di seluruh provinsi di Indonesia. Wilayah Kalimantan Timur menjadi daerah yang paling besar memiliki potensi tanah terindikasi telantar. Luasannya, mencapai lebih dari 250.000 hektare.

Adapun wilayah lain dengan potensi tanah telantar antara lain Sumatera Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan. Ketiga, sumber daya manusia. Gambaran transmigran dengan usia tua, tidak mengerti Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), dan berpendidikan rendah-menengah, harus diubah. Animo masyarakat bertransmigrasi yang masih tinggi harus diimbangi dengan kualifikasi yang baik.

Dibutuhkan pelatihan-pelatihan bagi calon transmigran tidak hanya

sebelum berangkat, namun juga setelah penempatan. Ini penting bagi transmigran agar mampu mengolah lahan sesuai potensi setempat.

Gagasan Menteri Transmigrasi tentang Transmigran Patriotik perlu disimak. Dengan program ini akan ada jaminan pendidikan kepada putra putri terbaik bangsa dari universitas ternama dengan menggandeng beasiswa LPDP. Yang penting setelah lulus bersedia ditempatkan di pemukiman transmigrasi. Ini menjadi tantangan bagi generasi muda sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia transmigrasi di masa depan.

Tidak mudah melakukan itu semua. Namun dengan kerjasama antar *stakeholder*, program transmigrasi akan terus berjaya. Apalagi ini juga mendukung dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Semoga ke depan transmigrasi terus eksis dan membawa kesejahteraan untuk semua. (*)-d

*)**Azsep Kurniawan**, Pemerhati Transmigrasi, bekerja di BBPPM Yogyakarta.

Pojok KR

BMKG prediksi cuaca ekstrem hingga 15 Desember.

- **Antisipasi sering terlambat.**

Mulai 2 Januari 2025 pemerintah siap melaksanakan program MBG.

- **Akses pendidikan juga perlu diprioritaskan.**

Menteri Hukum siap mediasi konflik dualisme kepengurusan PMI.

- **Jabatan di luar pemerintahan pun diperebutkan.**

Berabe